



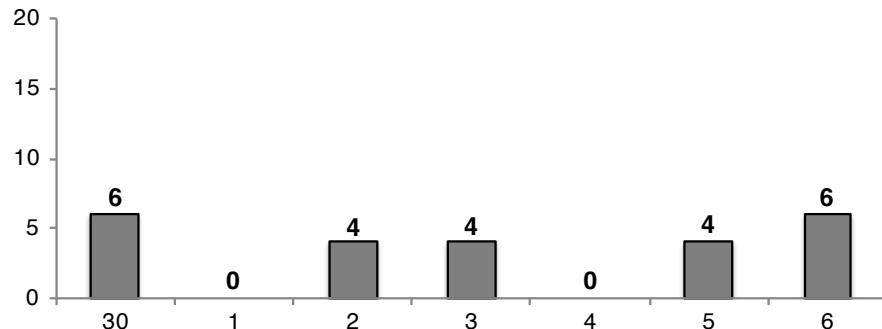
# LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah  
(06 Mei 2025)**

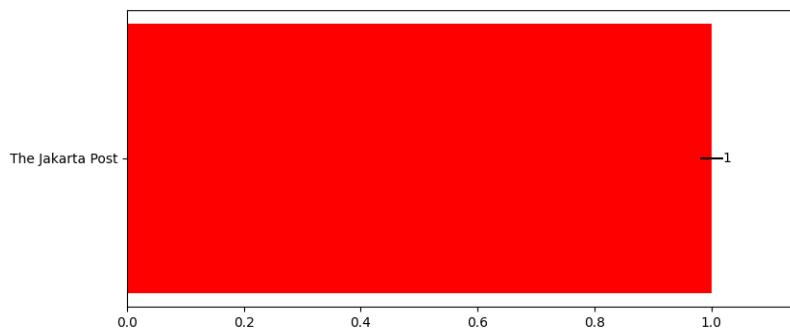
## Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
3	6	6	0	0

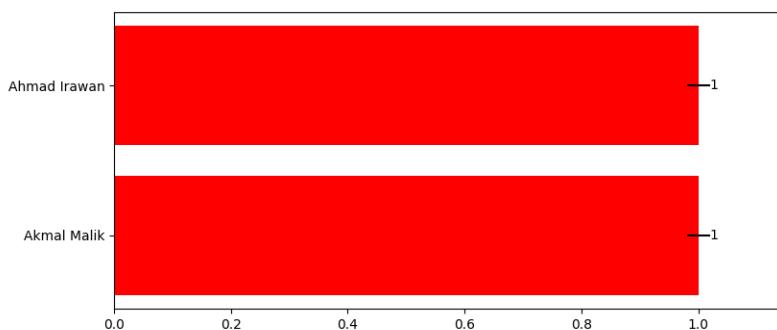
## Daily Statistic



## Media Share



## Influencers



## Table Of Contents : 06 Mei 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	06 Mei 2025	The Jakarta Post	Monarchs within the republic	6	Positive	Akmal Malik, Ahmad Irawan
2	06 Mei 2025	Suara Merdeka	Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat	9	Positive	Ahmad Luthfi
3	06 Mei 2025	Jateng Pos	Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat	1	Positive	Ahmad Luthfi
4	06 Mei 2025	Jateng Pos	Gubernur Larang Pungutan Sekolah di SMA dan SMK Negeri	12	Positive	Ahmad Luthfi
5	06 Mei 2025	Suara Merdeka	13 Proyek Investasi di Jateng Dipromosikan	3	Positive	Ahmad Luthfi
6	06 Mei 2025	Suara Merdeka	Bandara Ngoram Akan Diaktifkan Lagi	13	Positive	Ahmad Luthfi

<b>Title</b>	<b>Monarchs within the republic</b>		
<b>Media</b>	The Jakarta Post	<b>Reporter</b>	
<b>Date</b>	2025-05-06	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	6	<b>PR Value</b>	

## EDITORIAL

### *Monarchs within the republic*

**T**he sultanate city of Surakarta, also known as Solo, in Central Java, has recently become the talk of the town, not because of any great event it will host, but due to the controversy over whether it deserves the special region status its neighbor Yogyakarta has enjoyed since the founding of the Republic of Indonesia.

Regional Autonomy Director General Akmal Malik told a hearing of House of Representatives Commission II overseeing home affairs on April 24 that the Home Ministry had received aspirations to form six special regions, including in Central Java. Lawmaker Ahmad Irawan told the media that a member of the Surakarta royal family, Dony Nur Adiningrat, was behind the proposal for the formation of Surakarta as a special region separate from Central Java.

Speaking to the media, Dony said the Surakarta sultanate's role in the early phase of Indonesian independence and its rights over its past assets should be acknowledged by the state by reinstating Surakarta's special region status, which was revoked in 1946. Dony also spoke on social media on behalf of the crown prince of the Surakarta sultanate, Hamengkunegoro Sudhija, expressing his regret that the sultanate joined the republic.

After Indonesia gained independence, Surakarta was given special status that allowed self rule for its sultanate, similar to Yogyakarta. The Yogyakarta sultanate still has this authority, but its Surakarta counterpart lost its power in 1950 when the city was added to Central Java province after anti-monarchist sentiment grew in 1946.

A lawyer representing the Surakarta sultanate has said the sultan had no connection with the bid for special region status, while Surakarta Mayor Respati Ahmad Ardianto and Central Java Governor Ahmad Lutfi have dismissed the idea.

The aspiration to revive the Surakarta special region appears to lack public or political support and more or less reflects internal squabbling within the sultanate, which no longer holds any real power. Policymakers may deem the discourse a nonissue, but the Surakarta brouhaha should trigger a comprehensive review of special regions and the formation of new regions in general as practices that could undermine our democratic institutions.

Law No. 23/2014 on regional government does not specifically address the issue of granting special status to a region. In practice, however, the status has been awarded to a region based on the specificity of its history, culture and its role in the formation of the republic.

For example, Yogyakarta obtained special status, as stipulated in Law No. 13/2012 on Yogyakarta Special Region, as recognition of Yogyakarta's history as a kingdom that voluntarily joined the Republic of Indonesia after independence and its contribution to the formation of the state.

The manifestation of Yogyakarta's special status is the privilege given to the Sultan of Yogyakarta and the ruler of the Pakualaman principality to act as the governor and deputy governor, respectively, without going through elections. This very practice runs counter to the principles of electoral democracy through which people exercise their right to choose their regional leaders. The special status, to a certain extent, justifies the existence of a monarchy within the Republic.

Aceh also has special status, allowing the province to enforce sharia. This was a compromise the government accepted in order to bring an end to decades of bloody separatist violence in the country's westernmost territory. Unlike Yogyakarta, however, Aceh elects its leader as a demonstration of its commitment to democracy.

Policymakers should not entertain the notion of the formation of a Surakarta special region, as it will inspire dozens of other active royalties subjugated by the former Dutch colonial masters to follow suit. Similarly, the government and the House should cautiously respond to demands for the creation of new autonomous regions, as many of them are driven by the wishes of local elites to secure power.

Instead, it is time for us to assess whether special status has had a significant impact on the democratic governance of Yogyakarta, or whether it is merely symbolic. If the latter is the case, then a revision of the Yogyakarta Special Region Law is a must.

<b>Title</b>	<b>Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	ekd-45
<b>Date</b>	2025-05-06	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	9	<b>PR Value</b>	

## Ahmad Luthfi Jadikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat

**SEMARANG** - Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai rumah rakyat. Hal itu untuk mendekatkan layanan dan mempermudah layanan masyarakat.

"Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau *brain storming*, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengetahui segala permasalahan-permasalahan yang ada," kata Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat pada Senin, (5/5).

Dikatakan, rumah rakyat itu merupakan simbol kehadiran pemerintah

untuk melayani masyarakat. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

"Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur pelayanan publik di tempat kita," kata Luthfi.

Layanan di Rumah Rakyat dibuka di lantai 1 Kantor Gubernur Jateng. Dengan waktu pelayanan untuk Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 , dan pada

Jumat pukul 07.00-14.00.

### Secara Online

Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) seperti Bakorwil Solo untuk Eks Karesidenan Soloraya, Bakorwil Pati untuk Eks Karesidenan Pati, dan Bakorwil Banyumas untuk Eks Karesidenan Banyumas.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan permasalahan yang ada di sekitarnya secara *online*. Melalui website [ppid.jatengprov.go.id](http://ppid.jatengprov.go.id) dan dinas-dinas terkait, juga nomor WhatsApp 08112773393. Layanan secara *online*

ini terbuka 1x24 jam.

"Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau *online* boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota," jelas Luthfi.

Melalui Rumah Rakyat tersebut, rencananya juga akan digelar dialog bersama Gubernur dan Wakil Gubernur setiap sebulan sekali dengan topik-topik yang sudah ditentukan. Misalnya pada saat launching, digelar dialog dengan topik pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional.(ekd-45)

Title	<b>Ahmad Luthfi Jadikan kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat</b>		
Media	Jateng Pos	Reporter	adv/ucl
Date	2025-05-06	Tone	Positive
Page	1	PR Value	



## Ahmad Luthfi Jadikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat

**SEMARANG** - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara resmi membuka Kantor Gubernur sebagai rumah rakyat. Hal ini untuk mendekatkan layanan dan mempermudah layanan masyarakat.

"Kantor Gubernur ini tidak hanya tempat kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda, tetapi kantor ini kita gunakan untuk melakukan komunikasi dua arah atau brain storming, dengan membuka ruang untuk masyarakat agar mengadukan segala permasalahan-permasalahan yang ada," kata Luthfi saat meluncurkan Kantor Gubernur Rumah Rakyat pada Senin, 5 Mei 2025.

Ia mengatakan, rumah rakyat ini merupakan simbol kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan aktual, merumuskan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.

"Ini bentuk keterbukaan kita dalam rangka pelayanan publik. Sekaligus sebagai balancing (penyeimbang), dan koreksi bagi kita terkait dengan unsur partisipasi publik di tempat kita," kata Luthfi.

Layanan di Rumah Rakyat dibuka di lantai 1 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dengan waktu pelayanan untuk Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan pada Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.

Bagi daerah yang wilayahnya jauh dari Kantor Gubernur, dapat datang di masing-masing kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) seperti Bakorwil Solo untuk Eks Karesidenan Soloraya, Bakorwil Pati untuk Eks Karesidenan Pati, dan Bakorwil Banyumas untuk Eks Karesidenan Banyumas.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengadukan permasalahan yang ada di sekitarnya secara online. Melalui website [pid.jatengprov.go.id](http://pid.jatengprov.go.id) dan dinas-dinas terkait, juga nomor WhatsApp 08122773393. Layanan secara online ini terbuka 1x24 jam.

"Siapapun boleh mengadu. Mengadu langsung boleh, lewat call center atau online boleh. Kita siap melayani berikut dengan penyelesaiannya. Ini akan segera kami linierkan dengan bupati dan wali kota," jelas Luthfi.

Seluruh Dinas juga sudah diinstruksikan untuk menanggapi aduan dengan cepat, sehingga aduan masyarakat bisa tertangani.

"Guru, siswa, orangtua dan siapa pun boleh mengadu tentang permasalahan-permasalahan. Hari berikutnya nanti bisa nelayan, petani, dan siapa pun," jelasnya. (adv/ucl)

DOKPROVJATENG  
RESMI MEMBUKA: Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, resmi membuka Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai Rumah Rakyat.

Title	<b>Gubernur Larang Pungutan Sekolah di SMA dan SMK Negeri</b>		
Media	Jateng Pos	Reporter	jan
Date	2025-05-06	Tone	Positive
Page	12	PR Value	



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi bersama Wagub Jateng Taj Yasin di acara launching kantor gubernur rumah rakyat, Senin 5 Mei 2025.

HUMAS/JATENGPOS

# Gubernur Larang Pungutan Sekolah

**Di SMA dan SMK Negeri, Kalau Ada Laporkan**

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tidak ada lagi pungutan yang ditarik oleh SMA Negeri di Jawa Tengah. Sebab seluruh kegiatan pendidikan sudah ditangani oleh pemerintah.

"Di SMA sudah tidak ada pungutan karena P5 sudah nggak berlaku," katanya usai dialog terkait masalah pendidikan yang digelar di Rumah Rakyat, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 5 Mei 2025.

Luthfi menjelaskan dalam Permen-

dikbud nomor 75 tahun 2016 dijelaskan bahwa komite sekolah tidak boleh memungut atau meminta pembiayaan dari orangtua murid. Komite sekolah hanya boleh menerima sumbang sukarela atau tanpa paksaan dari orangtua murid untuk mendukung kegiatan pendidikan.



Kita ada Permendikbud nomor 75. Orangtua siswa boleh menyumbang tetapi Komite Sekolah tidak boleh memungut atau meminta

AHMAD LUTHFI  
(Gubernur Jateng)

"Kita ada Permendikbud nomor 75. Orangtua siswa boleh menyumbang

tetapi Komite Sekolah tidak boleh memungut atau meminta. Pembiayaan sudah ditangani oleh BOS, BOSDA, dan lain sebagainya," jelasnya.

Ia juga meminta kepada Komite Sekolah untuk mensosialisasikan hal itu dengan baik kepada orangtua atau wali murid.

Luthfi dengan tegas menyatakan bahwa apabila masih ada sekolah yang meminta atau menarik biaya atau pungutan kepada orangtua/wali murid agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

"Untuk itu kalau memang ada SMA Negeri yang masih menarik biaya atau pungutan segera laporkan kita. Akan kita evaluasi," tegas Mantan Kapolda

Jateng itu.

Sebelumnya, dalam dialog di Rumah Rakyat tersebut, salah seorang guru dari SMAN 1 Semarang, Laksono, mengadu kepada Gubernur Ahmad Luthfi tentang pembiayaan sekolah dari orangtua murid. Terutama terkait pembiayaan kegiatan P5 pada kurikulum merdeka yang belum tercover oleh BOS dan lainnya.

"Sumbangan sukarela banyak kendala. Kepala sekolah sering dilaporkan punngli. Dana BOS tidak mencukupi. Bagaimana menjembatani agar komite dan orangtua murid punya satu persepsi yang sama," katanya kepada Ahmad Luthfi. (\*/jan)

<b>Title</b>	<b>13 Proyek Investasi di Jateng Dipromosikan</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	K14-40
<b>Date</b>	2025-05-06	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	3	<b>PR Value</b>	



CJIBF 2025: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Rosellasarai saat membuka kegiatan CJIBF 2025 di Semarang, Senin (5/5).

## 13 Proyek Investasi di Jateng Dipromosikan

**SEMARANG** - Terdapat 13 proyek investasi *clean and clear* di Jawa Tengah yang dipromosikan.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menuturkan, kepastian hukum dan investasi di Jateng akan menarik lebih banyak investor untuk datang.

Ada 13 proyek investasi yang sudah *clean and clear* ditawarkan dan bila ada kendala dalam prosesnya akan dibantu menyelesaikan.

Di sektor *renewable energy*, terdapat promosi investasi proyek Candi

Umbul Telomoyo dan Djeng Geothermal Power Plant, Waste to

Derived Fuel Grobogan, dan Mini

Hydro Power Plant Banyumas. Di sektor

Pertanian dan Hilitrisasi Makanan

Minuman, dipromosikan proyek

Industri Garam Jepara, Sentra Industri

Perikanan Pati, Sistem Resi Gudang

dan Subterminal Agribisnis Grobogan,

Pengolahan Cassava Banjarnegara, serta Pengolahan Kelapa Terintegrasi, Industri Pengolahan Udang Terintegrasi, dan Kawasan Ekonomi Khusus Perikanan di Cilacap.

"Selain itu, terdapat pula promosi investasi proyek pengembangan Green Hospital di Kabupaten Semarang di sektor kesehatan, serta proyek Taman Kyai Langgeng Ecopark Magelang di sektor pariwisata," tuturnya saat saat membuka kegiatan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2025 di Semarang, Senin (5/5).

Pada gelaran CJIBF kali ini, calon

investor juga melakukan pertemuan bisnis dengan pengelola lima kawasan industri di Jawa Tengah, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Industri Batang, Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Wijayakusuma, Jatengland Industrial Park Sayang, dan Batang Industrial Park.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, ekonomi Jateng yang tumbuh 4,95 persen tahun 2024, salah satunya juga ditopang oleh investasi sebagai kontributor dengan PDRB 30,53 persen dengan mencatatkan pertumbuhan 6,55 persen.

Pemprov bersama KPwBI Jateng terus bersinergi mendorong market dengan memperluas akses ekspor serta akses informasi dan promosi destinasi pariwisata.

**Teken LoI.**  
Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan sejumlah Letter of Intent (LoI) di sejumlah sektor seperti tekstil, furniture hingga pertanian.

Kepala DPMPTSP Jateng Sakina

Rosellasarai menambahkan, industri tekstil masih mendominasi realisasi investasi pada Triwulan I-2025 untuk PMA dan PMDN disusul industri kulit dan barang dari kulit, industri karet dan plastik serta industri makanan. Lalu yang kelima adalah dari sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Investasi Jateng pada Triwulan I/2025 tercatat mencapai Rp21,848 triliun berdasarkan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp14,08 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,26 triliun.

Adapun jumlah proyek tercatat ada 20,431 proyek investasi, dengan serapan tenaga kerja mencapai 97.550 pekerja.

Penerapan pekerja berkontribusi 16,4 persen dari total penerapan tenaga kerja se-Indonesia.(K14-40)

<b>Title</b>	<b>Bandara Ngiloran Akan Diaktifkan Lagi</b>		
<b>Media</b>	Suara Merdeka	<b>Reporter</b>	H18
<b>Date</b>	2025-05-06	<b>Tone</b>	Positive
<b>Page</b>	13	<b>PR Value</b>	

## Bandara Ngiloran Akan Diaktifkan Lagi

**BLORA**- Setelah sekian lama vakum, Bandar Udara (Bandara) Ngiloran di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, akan diaktifkan lagi. Pengaktifan kembali bandara untuk melayani penerbangan komersial itu seiring telah ditetapkannya Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai bandara internasional per 25 April 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2025. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kini mengalihkan fokusnya pada pengaktifan kembali dua bandara perintis di Jawa Tengah, yakni Bandara Dewandaru di Jepara dan Bandara Ngiloran di Blora.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Blora Arief Rohman mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jateng terkait rencana pengaktifan Bandara Ngiloran.

"Beberapa waktu lalu Pak Gubernur telepon saya. Sekarang ini masih dalam tahap pembahasan final. Kemungkinan besar maskapai yang akan masuk adalah Susi Air untuk mengaktifkan kembali penerbangan di Bandara Ngiloran," ujar Bupati Arief Rohman, Senin (5/5).

Menurut Bupati, Gubernur Jateng sedang mengupayakan agar

bandara-bandara perintis di beberapa daerah di Jawa Tengah turut diaktifkan kembali demi pemerataan pembangunan wilayah. "Pak Gubernur sekarang sedang mendorong pengaktifan bandara di beberapa kota. Selain Blora juga Jepara, Cilacap, dan Purbalingga. Ini langkah strategis untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," ungkapnya.

Bupati mengemukakan, pihaknya kini tengah menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan terkait tahapan finalisasi operasional kembali Bandara Ngiloran. Dia berharap prosesnya berjalan lancar dan bisa segera terrealisasi.

Menurut Bupati, jika Bandara Ngiloran kembali aktif, maka akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Blora, terutama dalam menarik investasi dan mendorong sektor pariwisata. Selain itu juga bisa membuka akses lebih luas transportasi Blora dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Sekadar diketahui, Bandara Ngiloran Blora diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021. Pembangunan bandara ini menelan anggaran Rp132 miliar dari

APBN. Dua maskapai penerbangan yakni Citylink dan Wings Air sempat melayani penerbangan komersial dari Bandara Ngiloran menuju Jakarta (PP). Penerbangan perdana Citilink dilakukan pada 26 November 2021 dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, setiap Jumat ke Cepu. Hanya saja sejak 26 Januari 2022 seiring dimulainya revitalisasi Bandara Halim, rute penerbangan diubah dari Bandara

Cengkareng, Jakarta menuju Bandara Juanda Surabaya dan ke Bandara Ngiloran. Namun, sejak Maret 2022, Citilink kemudian memutuskan penghentian sementara penerbangan ke Bandara Ngiloran.

Adapun penerbangan perdana Wings Air dari Bandara Pondok Cabe Jakarta ke Bandara Ngiloran dilakukan pada 5 Agustus 2022. Namun, pada 19 Agustus 2022, penerbangan dihentikan. (H18)



SM/Abdul Muiz

**BANDARA NGLORAM:** Bandara Ngiloran di Kecamatan Cepu, Blora. Kini muncul rencana bandara yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2021 itu akan diaktifkan lagi.